

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai suatu negara, Indonesia merupakan laboratorium raksasa yang sedang berevolusi. Meskipun telah berusia 70 tahun sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia masih harus banyak belajar untuk menjadi negara-bangsa (*nation-state*). Sejak berdirinya Republik ini, Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi. Bentuk negara yang dipilih adalah negara kesatuan. Dalam perjalanannya, demokrasi kesatuan di Indonesia berjalan dengan penuh dinamika.<sup>1</sup>

Dengan menerapkan sistem demokrasi, para pemimpin pasca kemerdekaan tidak pelak lagi harus memikirkan dilaksanakannya pemilu (pemilihan umum) sebagai sistem untuk mengatur peralihan kekuasaan. Setelah mengalami banyak kisruh politik, baru pada tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia bisa diselenggarakan. Dinamika perpolitikan tanah air menjadi semakin memanas pasca Presiden Soeharto dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998.

Terdapat empat perubahan mendasar dalam mekanisme pemilu. Pertama, kembalinya sistem 'multi-partai' dari sistem 'tri-partai' dalam pemilu yang direalisasikan pada 7 Juni 1999 dengan diikuti oleh 48 partai. Kedua, pada pemilu 2004, pemilu diadakan dua kali; Pemilu pertama untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemilu kedua untuk memilih presiden secara langsung. Perubahan ketiga, dengan dikeluarkannya PP No. 6 tahun 2005

---

<sup>1</sup> Firmanzah.2010. *Persaingan, legitimasi kekuasaan, dan marketing politik*. Jakarta.

(tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan PILKADA ( Pemilihan Kepala Daerah ) secara langsung seperti yang diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004. Perubahan keempat, pada pemilu 2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan penghitungan suara secara menggunakan suara terbanyak dan bukan nomor urut caleg. Keempat, perubahan mendasar ini telah memengaruhi sistem, struktur, intensitas persaingan, dan perilaku-perilaku institusi-institusi yang terlibat dalam setiap pemilu baik nasional maupun di daerah.<sup>2</sup> Selain itu, perubahan politik selama ini antara lain dilihat melalui, Pertama, proses liberalisasi politik pasca-Orde baru yang memungkinkan para aktor politik menikmati situasi politik yang lebih bebas dalam menyampaikan dan mengorganisasi kepentingan melalui partai politik dan meraih dukungan politik dari rakyat dalam proses electoral. Kebebasan tidak hanya dirasakan oleh politisi, melainkan juga warga pemilih. Seperti halnya yang dialami oleh politisi, pemilih lebih bebas memilih atau bahkan mengalihkan garis dukungannya dalam berbagai momen pemilihan. Kedua, reformasi kelembagaan demokrasi mendorong aktor-aktor politik yang terlibat relatif banyak, beragam dan memiliki tingkat densitas yang semakin tinggi dibandingkan dengan era orde baru. Di era tersebut aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik sangat terbatas dan hanya berkisar di lingkaran kecil elite birokrasi dan militer. Akibatnya, beragam artikulasi kepentingan di luar birokrasi lebih banyak ditanggapi

---

<sup>2</sup> *ibid.* hal 8-9

melalui proses klientelisme atau penyerapan aspirasi tanpa proses pelibatan aktor-aktor di luar birokrasi negara.<sup>3</sup>

Lepas dari itu, pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi memberikan pengaruh relatif signifikan terhadap perkembangan politik lokal. Sulit dibantah telah terjadi kebangkitan politik lokal dengan berkembangnya jumlah aktor yang ikut berperan dalam menentukan kebijakan publik, baik di level pusat maupun daerah.<sup>4</sup> Konsekuensi dari penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam sepuluh tahun terakhir ini berlangsung pergeseran pendulum politik dari politik yang serba sentralistik (Jakarta-centris) ke politik yang lebih lokal. Melalui undang-undang otonomi daerah tersebut<sup>5</sup> ruang-ruang politik menyebar dan meluas ke aras lokal, mulai dari level desa sampai provinsi. Kalau pada masa orde baru politik sepenuhnya ditentukan oleh Jakarta, kini para aktor politik di aras lokal mempunyai kesempatan yang semakin luas dalam aktivitas dan manuver politiknya. Dengan demikian, desentralisasi memberikan warna lain dalam proses demokratisasi di Indonesia. Munculnya keragaman aktor dalam proses politik dan pemerintahan tidak hanya ada di arena politik nasional tetapi juga di daerah.

Penelitian Fisipol UGM (2000) memperlihatkan bahwa politik lokal pasca-Suharto ditandai dengan bangkitnya kembali entitas politik masa lalu (karaton, fetor, dan karaeng) dan semakin dominannya peranan local boss, the

---

<sup>3</sup> Siti Zuhro. Dkk. 2009. *Demokrasi lokal, peran aktor dalam demokratisasi*. Yogyakarta. Hal 3

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal 6

<sup>5</sup> UU 22/1999 tentang pemerintah daerah berlaku mulai 2001-2004 dan kemudian digantikan oleh UU 32/2004 tentang pemerintah daerah yang berlaku mulai 2004-sekarang.

big man (orang besar) dalam interaksi ekonomi politik lokal.<sup>6</sup> Menyoal konteks dinamika perpolitikan di Bangka Selatan, menjelang pemilukada yang akan digelar pada 9 desember yang akan datang. Mempertarungkan 3 pasangan kandidat. *Pertama* , Justiar Noer-Riza Herdavid dengan diusung partai politik yaitu; DEMOKRAT, PKS. *Kedua*, pasangan Rina Tarol-Djulaili Romli dengan partai pengusung; PDIP, PAN dan PKB. *Ketiga*, pasangan H. Jamro-Firmansyah dengan partai pengusung yaitu; NASDEM, GERINDRA, HANURA, dan PBB.<sup>7</sup> Dalam prakteknya berbicara peran aktor lokal dalam politik selalu menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan studi tentang Aktor lokal tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor saja (Kuangan/finansial), melainkan aktor lokal mempunyai banyak wajah (multy faces) yang mencerminkan kompleksitas atau keragaman cara pandang dalam berpolitik. Keterlibatan aktor lokal dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung tidak bisa di hindarkan. Karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif. Keterlibatan dalam penggalangan mobilisasi massa misalnya, mereka mempunyai kemampuan masing–masing. Di lain sisi, peran aktor-aktor lokal dalam pesta demokrasi sangat dominan. Potret fenomena ini ditandai dengan berpartisipasinya para aktor lokal dalam proses kampanye pra pemilihan. Kontribusi nyata yang dilakukan para aktor aktor lokal di Bangka Selatan adalah terlibat langsung dalam kampanye blusukan

---

<sup>6</sup> Fisipol UGM, 2000, "*Kecamatan sebagai basis Pengembangan demokrasi, pelayanan publik, Intermediary dan ekonomi di tujuh Provinsi*", Laporan tidak di publikasikan.

<sup>7</sup> Diakses melalui Kpu-baselkab.go.id, 20 oktober 2015.

mendampingi pasangan kandidat. Selain itu, manuver manuver, strategi dan pendekatan semakin gencar dilakukan oleh masing masing pasangan kandidat terhadap masyarakat.

Hal ini tentunya mampu menggeraknya kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan. Selain mampu menggerakkan kesadaran masyarakat, para aktor lokal juga memberikan pengaruh dan citra positif di mata masyarakat terhadap pasangan kandidat yang akan bertarung dalam pesta demokrasi.

Namun demikian kehadiran aktor lokal tidak selalu berdampak positif terhadap demokrasi dan sering kali tindakan para aktor politik kita menghambat laju demokratisasi, karena hal itu dianggap mengancam kepentingan mereka. Hambatan tersebut diperparah dengan berbagai prakondisi kita saat ini yang tidak kondusif bagi demokratisasi. Kemiskinan yang meluas dan terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber informasi, misalnya, melemahkan kemampuan mereka untuk mengartikulasikan kepentingannya dan mengontrol kekuasaan. Hal itu juga membuat masyarakat rentan terhadap godaan politik uang dan mudah dimobilisasi untuk berbagai tujuan yang tidak demokratis, seperti menentang hasil pemilu dengan kekerasan, mengusir kelompok yang berbeda agama, dan mendorong pemberlakuan kebijakan yang diskriminatif.

Bertolak dari uraian singkat tersebut, kiranya jelas bahwa aktor memiliki peran penting dalam mendorong dan menghambat demokratisasi. Oleh karena itu, studi ini dan relevan dilakukan di era konsolidasi demokrasi saat ini. Dan untuk melengkapinya, studi ini mencoba menggali secara kritis

kehadiran aktor-aktor dalam politik lokal dan sejauh mana peran mereka dalam mendorong proses demokrasi di aras lokal, serta melihat sejauh mana peran para aktor-aktor politik lokal dalam memenangkan kandidat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran aktor lokal dalam Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Bangka-Selatan ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dengan melihat rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran aktor lokal dalam Pemilukada tahun 2015 di Bangka-Selatan.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.

3. Sasaran Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi tambahan bagi para politisi, partai politik peserta pemilu maupun masyarakat umum sebagai sumber referensi dalam mengkaji peran informal politik (aktor lokal) dalam pemilukada di Bangka Selatan.

## **E. KERANGKA TEORI**

Teori merupakan suatu landasan dalam membahas permasalahan yang akan di teliti agar tidak melenceng dari topik yang akan diteliti. Teori juga merupakan salah satu dari unsur penelitian yang sangat penting untuk menerangkan fenomena sosial yang akan di teliti. Kerlinger mengatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang saling kait mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atau fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan diantara variabel yang terkait dengan fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut.<sup>8</sup> Untuk menjelaskan permasalahan diatas maka peneliti menggunakan beberapa teori yaitu:

### **1. Teori Elit**

Memahami jati diri bangsa Indonesia bukan sekedar warisan yang ditemukan atau datang dengan sendirinya. Jati diri tersebut sesungguhnya sebuah konstruksi emosional, intelektual, dan ideologis yang diciptakan, dibangun dan diperjuangkan oleh Elit Politik. Elit politik adalah orang-orang terbaik atau pilihan di satu kelompok atau kelompok kecil orang-orang terpandang atau petinggi politik, yang duduk dalam tatanan

---

<sup>8</sup>Zamroni. 1992. *Pengantar pengembangan teori social*. Tiara Wacana, Yogyakarta, Hal2.

Struktur Politik dalam hal ini anggota legislatif (DPR/DPRD) dan atau Partai Politik (Parpol), atau pemerintah baik pusat maupun daerah.<sup>9</sup>

#### a. Konstruksi Teori Elite

Kata elit dapat diartikan dalam berbagai konteks yang berarti terbaik, istimewa, paling mulia atau hal yang terbaik dari sesamanya. Pareto menjelaskan bahwa elit secara sederhana dapat diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan istimewa atau lebih dalam kegiatan tertentu seperti pengetahuan politik atau bisnis besar. Pareto juga membagi istilah elit kedalam dua hal. Pertama, *a governing elite* yaitu sekumpulan pemimpin yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran dalam mengatur masyarakat. Kedua, *a non-governing elite* yaitu sebagai penguat atau pengkritik dari kelompok elit itu sendiri. Dalam pengetahuan sosial kontemporer, kata elit mengacu pada kelompok-kelompok yang memiliki status tinggi dalam masyarakat karena alasan apapun.<sup>10</sup>

Asumsi teori elite mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori : 1) Sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan mereka disebut : (a.) Elite yang berkuasa dan (b.) Elite yang tidak berkuasa. 2). Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.<sup>11</sup>

## 2. Teori Modalitas

---

<sup>9</sup> Agus Pramono, 2005, *Elite politik : yang loyo, dan harapan masa depan*, Jakarta, hal 3

<sup>10</sup> Dunleavy, Patrick & O'Leary, Brendan. 1987. *Theories of the state: The politics of liberal democracy*. New York: Meredith Press.

<sup>11</sup> Varma, SP., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1975.



Dalam sistem pemilihan umum langsung seperti yang diterapkan Indonesia, setidaknya dibutuhkan tiga modal (*capital*) sebagai prasyarat agar seseorang kandidat dapat terpilih. Ketiganya saling membutuhkan, meski bukan berarti akan gagal total jika kekurangan salah satunya. Ketiga modal tersebut adalah modal sosial (*social capital*), modal ekonomi (*economic capital*), dan modal budaya (*cultural capital*).<sup>12</sup> Perbedaan akses terhadap ketiga modal tersebut akan sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam mendapatkan peluang-peluang ekonomi, sosial, politik.

Ini bisa digunakan untuk membantu menjelaskan sepaik terjang elite dengan menggunakan kaca mata ketersediaan dan ketiadaan tiga modal ala Bourdieu.<sup>13</sup> *Pertama*, adalah ketersediaan modal sosial (*social capital*). Menurut Putnam, modal sosial merujuk kepada kerangka-kerangka organisasi kemasyarakatan, seperti jejaring, norma norma, sikap saling mempercayai (*trust*) yang memungkinkan terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Konsep yang mendasari modal sosial sudah lama. Para filsuf yang menekankan hubungan antara kehidupan masyarakat yang pluralistik dan demokrasi termasuk James Madison (*The Federalist*), Alexis de Tocqueville (*democracy in Amerika*), dan banyak penulis lainnya dalam tradisi pluralis yang dominan dalam ilmu politik Amerika.<sup>14</sup> *Kedua*, adalah ketersediaan modal ekonomi (*economy capital*). Seseorang bisa

---

<sup>12</sup> Richard Harker, dkk (ed.), *dalam judul buku politik elite muhammadiyah, (studi tentang fragmentasi elite muhammadiyah)*, Yogyakarta. Hal 35

<sup>13</sup> Richard Harker, dkk (ed.), *dalam judul buku pengantar paling komprehensif kepada pemikiran Pierro Bourdieu, (Habitus x modal) + ranah = praktik*, Terj. Yogyakarta: jalansutra, 1990, Hal 76

<sup>14</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/modal\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/modal_sosial)

memiliki modal ekonomi karena hasil usahanya sendiri atau warisan dari lelehurnya. Masuk dalam kelompok ini adalah konglomerat, pengusaha, saudagar, dan pekerja profesional. Dalam konteks pemilu, modal ekonomi tidak selalu berarti modalnya sendiri. Seseorang kandidat juga bisa menggunakan modal ekonomi orang lain.

Dan hal ini banyak terjadi, dimana seorang kandidat mencari bantuan dari (atau malah ditawarkan oleh) pengusaha, bandar broker. Namun resikonya jelas, jika terpilih maka kandidat tersebut harus mengembalikan pinjaman. Pengembalian ini bisa secara langsung, yang bisanya "memaksa" mereka untuk mengambil jalan yang melanggar hukum, seperti menerima gratifikasi, bonus, komisi, upeti dan sebagainya.

Pengembalian juga bisa secara tidak langsung, yakni melalui pembagian proyek atau pemenangan tender.<sup>15</sup> *Ketiga*, ketersediaan modal budaya (*cultural capital*). Meminjam David Efendi, terminologi modal simbolik untuk menggantikan modal budaya. Modal budaya, merujuk pada Bourdieu, terkait dengan tingkat dan jenis pendidikan, kemampuan mengapresiasi seni, pengalaman budaya, dan keagamaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah cendekiawan, intelektual, akademisi, budayawan, seniman, dan tokoh agama (khususnya yang melekat pada citra selebritis).<sup>16</sup>

Modal budaya menjadi penting bagi siapapun yang berniat aktif dalam dunia politik, karena politik membutuhkan aktor-aktor yang

---

<sup>15</sup> David Efendi, 2014. *politik elite muhammadiyah, (studi tentang fragmentasi elite muhammadiyah)*, Yogyakarta. Hal 35

<sup>16</sup> *ibid*, hal 38

berwawasan luas dan kadar intelektualitas yang memadai, terutama untuk memahami, menganalisis dan mencari solusi atas berbagai masalah. Tanpa itu, para pengambil kebijakan (*decision makers*) tidak akan mampu menawarkan kebijakan yang baik bagi masyarakat luas (*public good*).

**Tabel 1.1**  
**Modalitas Bourdieu**

Jenis modal	Cakupan modal ; meliputi
Modal sosial ( <i>social capital</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan (dalam dan luar negeri)</li> <li>2. Status dalam masyarakat (pendidikan, agama, dll)</li> <li>3. Keturunan ( Bangsawan, penguasa)</li> <li>4. Kekuatan pengaruh dalam masyarakat</li> <li>5. pengurus organisasi besar dan terhormat</li> </ol>
Modal politik ( <i>political capital</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jabatan politik</li> <li>2. Pengalaman mengorganisasi massa</li> <li>3. Keturunan ( bangsawan, penguasa)</li> <li>4. Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik</li> <li>5. Reputasi dan legitimasi</li> </ol>
Modal ekonomi ( <i>economical capital</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekayaan (finansial, material)</li> <li>2. Keturunan (bangsawan, penguasa)</li> <li>3. Kekuatan pengaruh dalam masyarakat</li> <li>4. Kelas menengah santri</li> <li>5. Birokrat pemerintahan</li> </ol>
Modal Simbolik (modal budaya)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gelar pendidikan (tinggi)</li> <li>2. Citra dan simbol agama</li> <li>3. Penghargaan terhadap karya seni/budaya/dakwah kultural</li> </ol>

Senada dengan Bourdeu, Max Weber (1919) memberikan basis analisis yang sangat penting untuk memperlihatkan bagaimana elit tertentu mendapatkan legitimasi atas kekuasaan yang diperoleh. Weber memberikan tiga jenis legitimasi yaitu legitimasi yang berasal dari kekuasaan tradisional yang bersumber dari generalogi keluarga; kekuasaan kharismatik yang diperoleh karena integritas elit atau

kandidat, dan terakhir legal-rasional dimana elit mendapatkan kekuasaan karena mekanisme legal, misalnya pemilu.

### 3. Local Strongman

Keberadaan praktik dari *informal governance* (pemerintahan informal), atau *shadow state*, sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Pada tataran teoritis, diskusi di kalangan para pengamat tentang fenomena *shadow state* sudah muncul di permukaan pada tahun 1990-an. Misalnya, Barbara Harriss-white (2003) telah menulis tentang interkorelasi antara *informal economy* dan praktik *shadow state* dengan merujuk temuan studinya di India pada tahun 1990-an.

Dalam konteks Indonesia, khususnya pada periode pasca pemerintahan orde baru, memang harus diakui bahwa analisis kritis tentang praktik *shadow state* dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada pasca pemerintahan Soeharto.<sup>17</sup> Menurut Harriss-white sedikitnya ada dua pengertian yang melekat pada terminologi *informal economy*. Pertama, kegiatan usaha perorangan, dan/atau perusahaan yang tidak didaftarkan kepada pemerintah, dan tidak membayar pajak. Kedua, berkaitan dengan perilaku (*behaviour*) dari institusi formal (publik maupun swasta) untuk menghindari jangkauan regulasi. Bentuk dari kegiatan *informal economy* yang disebut kedua ini, antara lain: kelonggaran pajak, penyalahgunaan kebijakan publik, korupsi, kolusi, dan pemaksaan swastanisasi aset negara.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Henk schulte, dkk. Terj, (ed) *dalam buku politik lokal di Indonesia*. 2009. Jakarta. Hal 278

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 279

Dari kedua kategori kegiatan *informal economy* di atas, terlihat dengan jelas bahwa bentuk *informal economy* yang pertama merupakan arena bagi "si kecil" (petani dan pengusaha kecil). Sementara bentuk *informal economy* yang kedua merupakan dominan dari "si besar" (para pengusaha besar dan para pejabat negara).

Sedikitnya dapat dicatat ada empat karakteristik umum dari praktik *informal market* dan *shadow state*. Pertama, jelas tergambar bahwa *informal market* dan *shadow state* hadir, tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari terjadinya pelapukan fungsi dari institusi formal (negara). Kedua, akumulasi keuntungan ekonomi dan politik jangka pendek (*short-term political and economic benefits*) di luar bingkai regulasi formal, merupakan tujuan utama dari 'transaksi' melalui *informal market*. Ketiga, modus operandi atau mekanisme kerja dari *informal market* dan *shadow state* cukup bervariasi, yang secara umum dapat dibedakan dalam dua kategori utama yaitu: melalui memanipulasi kebijakan publik, dan melalui jaringan aliansi antar personal (*individual alliances*), maupun aliansi antar lembaga (*institutional alliances*). Keempat, aktor (pelaku) yang terlibat dalam *informal market* dan *shadow state* adalah para penyelenggara negara (*state actors*) dan aktor-aktor dalam masyarakat (*societal actors*).<sup>19</sup>

#### **4. Teori Aktor**

Teori strukturasi mengajarkan konsep tentang individu yang dikatakan sebagai aktor (*agency*) yang memiliki peran untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 280

memproduksi dan mereproduksi struktur dalam tatanan sosial yang mapan. Jadi agen mampu untuk merubah dan menghasilkan struktur-struktur baru jika tidak menemukan kepuasan dari struktur yang sudah ada sebelumnya.

Teori strukturasi yang memusatkan perhatian pada praktik sosial yang berulang itu pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur. Namun ia berpendirian bahwa tindakan agen itu dapat dilihat sebagai perulangan. Artinya aktivitas bukanlah dihasilkan sekali dan langsung jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus menerus mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu juga mereka menyatakan diri bahwa mereka sendiri adalah sebagai aktor.

Di dalam dan melalui aktivitas mereka, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas ini berlangsung. Dengan demikian, aktivitas tidak dihasilkan melalui kesadaran ataupun melalui konstruksional tentang sebuah realitas, dan tidak diciptakan pula oleh struktur sosial. Malahan dalam menyatakan diri mereka sendiri sebagai aktor, orang terlibat dalam praktik sosial itulah baik kesadaran maupun struktur itu diciptakan.

## **F. DEFINISI KONSEPSIONAL**

Definisi konsepsional adalah definisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan di teliti. Definisi konsepsional ini juga di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat

perhatian dalam ilmu sosial.<sup>20</sup> Sedangkan maksud dari definisi konseptual yaitu untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya:

1. Elit politik adalah orang-orang terbaik atau pilihan di satu kelompok atau kelompok kecil orang-orang terpandang atau petinggi politik, yang duduk dalam tatanan Struktur Politik dalam hal ini anggota legislatif (DPR/DPRD) dan atau Partai Politik (Parpol), atau pemerintah baik pusat maupun daerah.
2. Modalitas dalam Kontestasi Politik adalah modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, elit-elit/aktor-aktor sosial politik dan ekonomi untuk kemenangan pemelukada.
3. Local strongmen adalah orang yang tidak dalam posisi pemerintah namun kapasitas dan kemampuan pengambilan keputusan di berbagai kebijakan lokal seperti distribusi dan alokasi sumberdaya daerah lebih menentukan dibanding state aparatus ditingkat lokal, karena itu orang ini di aras lokal bertindak sebagai boss lokal atau shadow government.
4. Agen (Aktor) dalam struktursi adalah orang orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia.

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel-variabel. Sedangkan variabel adalah

---

<sup>20</sup> Singarimbun Masri, 1992. *Metode penelitian survey*, Jakarta LP3S, Hal 34.

suatu karakteristik yang mempunyai variasi/ukuran/score.<sup>21</sup> Untuk mengetahui peran aktor lokal dalam Pemilukada, maka indikator yang digunakan sebagai tolak ukurnya. Dan adapun indikator yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Elit :

- a. Memiliki peran dalam mengatur masyarakat (Kepala Desa)
- b. Memiliki status tinggi dalam masyarakat (Ulama Kampung)

2. Modalitas :

a. Modalitas sosial

- 1) Kepemilikan jaringan organisasi keagamaan (NU, MUHAMMADIYAH)
- 2) Kepemilikan jaringan dalam organisasi berbasis kerelawanan (Majelis Taklim, Paguyuban )
- 3) Pengurus organisasi besar (Pimpinan LSM, Ormas)

b. Modalitas politik

- 1) Pengalaman mengorganisasi massa (Ketua Tim Sukses)
- 2) Keturunan (Pengusaha)

c. Modalitas Ekonomi

- 1) Kepemilikan terhadap sumber kesejahteraan berupa finansial yang menonjol ( Pengusaha timah )
- 2) Kekuatan pengaruh dalam masyarakat (Ulama Kampung, Kepala Desa)

d. Modalitas simbolik

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal 46



- 1) Pencapaian derajat pendidikan kandidat (S1, S2, S3)
- 2) Citra dan simbol agama (Ustad, kiyai)
3. Local Strongmen
  - a. Kegiatan usaha perseorangan (pengusaha lada, timah)
  - b. Berasal dari institusi non formal maupun swasta (Kalangan akademisi)
4. Aktor (Agen)
  - a. Menjadi perantara dalam mempertemukan kandidat dengan calon konstituen.
  - b. Memiliki jaringan dan relasi sesama organisasi informal
  - c. Memiliki mobilisasi masa yang banyak

## **H. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>22</sup> Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

### **2. Lokasi penelitian**

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung. Hal 4

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan. Lokasi ini dipilih karena penulis memotret fenomena keterlibatan secara langsung para aktor lokal dan informal politik menjelang pemilu pada 2015.

### **3. Jenis Data**

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan. Misalnya, Ketua tim sukses pemenangan, aktor lokal, pimpinan LSM, Ormas, Ulama kampung.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>23</sup> Dian Eka Rahmawati, . 2011. *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>24</sup> *Ibid*

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara mendalam (depth interview)

Wawancara mendalam (depth interview) yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan secara langsung dengan informan yaitu kandidat Justiar Noer - Riza Herdavid, H. Jamro-Firmansyah, Rina Tarol-Djulaili Romli, Tim Pemenangan dan Relawan, Pengurus Partai pengusung pasangan kandidat dan aktor aktor informal politic. Hasil wawancara diharapkan dapat memberikan informasi berdasarkan topik penelitian ini mengenai peran aktor lokal dalam pemilukada. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik Shadowing, yang dimana peneliti mengikuti langsung beberapa agenda kegiatan tim pemenangan dan pasangan calon.

b. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah, studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>25</sup> Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika

---

<sup>25</sup> Ibid Hal 143

didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (*reduction*), (2) Sajian Data (*display*) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing*).<sup>27</sup> Reduksi data yang dimaksud adalah data hasil wawancara serta dokumentasi yang diperoleh yang kemudian diidentifikasi agar lebih mudah dan focus.

Setelah dilakukannya identifikasi pada data kemudian data dideskripsikan dalam bentuk sajian yang diperkuat dengan analisis untuk membuat kesimpulan. Sehingga proses analisis dimulai dengan melakukan strukturisasi data primer dari hasil wawancara dan obeservasi untuk dianalisis. Dalam analisis kualitatif, obyektivikasi data akan didapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang sesuatu. Artinya peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan treatment, baik mengarahkan agar responden memilih jawaban tertentu ataupun menginterpensikan makna keluar dari obyek yang diteliti. Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis ini

---

<sup>26</sup> Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd., 2013. “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”. Yogyakarta: Bumi Aksara, Hal: 144, 160 – 161, & 176.

<sup>27</sup> Ridvia Lisa. 2010. *Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman*. Padang. Universitas Negeri Padang.

kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan di lapangan.